



Pemerintah Kota Samarinda

RENJA PERUBAHAN BKPSDM 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**



**Rencana Kerja Perubahan
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda 2025**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp./Fax 0541-737060

S A M A R I N D A

bkppd.samarindakota.go.id

75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800 / 2514 /300.04

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
SAMARINDA
TAHUN 2026

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
- b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu dibentuk Tim Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Kedua :** Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu 2024 dan 2025 dan capaian Renstra SKPD;
 2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;
 5. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2026.
- Ketiga :** Tim Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2026 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda



Drs. Samlian Noor, M.Si
NIP. 19690404 199003 1010

Tembusan Yth.

1. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. BAPPERIDA Kota Samarinda

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Samlian Noor,M.Si	Ketua
2	Nor Hidayah,SE	Sekretaris
3	Dadi Herjuni,S.STP.M.Si	Anggota
4	Aditi Paramita Wisesa,SE.MM	Anggota
5	Himawan,S.STP	Anggota
6	Jemmy Risano,SH	Anggota
7	Samsaimun.R,SE	Anggota
8	Hj. Norhasanah,S.Sos	Anggota
9	Dody Romansyah Kang,S.Kom	Anggota
10	Siti Komariyah,SE	Anggota
11	Kendy Ega Pratama Sudarminto,S.Kom	Anggota
12	Haryadi Utomo,SH.MM	Anggota

Samarinda, 3 Maret 2025
Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda



Drs. Samlian Noor,M.Si
NIP. 19690404 199003 1010

KATA PENGANTAR

No : 800.1.10.5/6887/300.04

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini berisi tentang gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia/ Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kota Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025, dengan maksud agar dapat digunakan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik, saran/ pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan, untuk penyempurnaan Renja Perubahan di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga informasi singkat pada dokumen ini berguna dan bermanfaat.



Samarinda , 11 September 2025

Plt. KEPALA BADAN

Drs. Samlian Noor , M.Si

NIP. 196904041990031010

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	HAL i
	Daftar isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
	2.1 Evaluasi Renja BKPSDM Kota Samarinda Sampai Dengan Triwulan II	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	76
	3.1 Rencana Kerja	76
	3.2 Rencana Pendanaan	80
BAB IV	PENUTUP	98

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	HAL i
	Daftar isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
	2.1 Evaluasi Renja BKPSDM Kota Samarinda Sampai Dengan Triwulan II	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	76
	3.1 Rencana Kerja	76
	3.2 Rencana Pendanaan	80
BAB IV	PENUTUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan zaman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya manusia.

Agar terwujudnya pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, fungsi perencanaan sangat diperlukan sebagai sebuah peta yang berisikan apa yang akan dikerjakan meliputi : bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan; serta menjelaskan tujuan, strategi, sasaran, dan target yang dapat diukur secara sistematis.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disebut juga Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD”, menjabarkan sasaran dan program dalam 1 tahun yang ditetapkan oleh setiap perangkat daerah melalui kegiatan tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sesuai ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026 PD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Renja Perubahan Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program perangkat daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis (*democratic and good governance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus dikembangkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 029 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Rencana kerja perubahan yaitu mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2025 , sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Pada rencana kerja perubahan terjadi efisiensi anggaran sebesar 5 (lima) persen dari pagu keseluruhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Kota Samarinda No : 900/1569/300.02 tentang Rasionalisasi dan Efisiensi Anggaran Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Pagu Keseluruhan BKPSDM sebesar Rp. 43.626.937.038 . Pagu Efisiensi BKPSDM sebesar 1.536.636.674

Tetapi selain adanya efisiensi , BKPSDM juga mengajukan usulan penambahan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 . dikarenakan adanya kebutuhan pembiayaan yang harus dilaksanakan pada tahun 2025 tetapi pagu nya belum mencukupi. Pagu tahun

anggaran 2025 yang diusulkan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.516.770.000

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan TW II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (+ pembahasan IKU)
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 43.626.937.038 , untuk program dan kegiatan telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Namenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ini anggaran terbagi menjadi 1 (satu) program penunjang dan 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan belanja gaji tunjangan dan operasional.
2. Program Kepegawian Daerah yang terdiri dari kegiatan pengadaan , mutasi dan promosi , pengembangan kompetensi asn dan penilaian evaluasi kinerja aparatur.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra BKPSDM , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi . Secara rinci evaluasi Renja BKPSDM Kota Samarinda sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

REALISASI PAGU SAMPAI DENGAN TW2 BKPSDM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

No	Uraian	Pagu Murni	Realisasi Sampai Bulan Juni	Persentase Keuangan
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	29.136.798.756	6.217.379.860	21,34%
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.489.500,00	23.454.200,00	12,99%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.397.500,00	Rp 13.962.200,00	17,81%
2	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.317.000,00	Rp -	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.576.000,00	Rp 3.540.000,00	6,73%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.199.000,00	Rp 5.952.000,00	16,44%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.467.884.156,00	6.011.540.100,00	21,89%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.378.070.937,00	Rp 5.518.829.100,00	20,92%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.051.972.219,00	Rp 476.200.000,00	45,27%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.841.000,00	Rp 16.511.000,00	43,63%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.846.800,00	54.317.060,00	13,35%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	Rp -	0,00%

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.628.000,00	Rp -	0,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	Rp 4.800.000,00	19,20%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.998.800,00	Rp 26.145.000,00	70,66%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	Rp -	0,00%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.220.000,00	Rp 23.372.060,00	13,73%
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.000.000,00	30.000.000,00	18,75%
1	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	Rp -	0,00%
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	60.000.000,00	Rp 30.000.000,00	50,00%
V	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	253.320.000,00	70.216.100,00	27,72%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.320.000,00	Rp 6.216.100,00	7,46%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.000.000,00	Rp 64.000.000,00	37,65%
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.258.300,00	27.852.400,00	4,17%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.367.150,00	Rp 22.059.900,00	4,36%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	Rp -	0,00%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.491.150,00	Rp -	0,00%

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.400.000,00	Rp 5.792.500,00	15,91%
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.753.571.282,00	1.688.733.407,00	21,78%
VII	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.355.366.157,00	327.633.180,00	24,17%
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	23.062.000,00	Rp -	0,00%
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	703.412.000,00	Rp 316.624.400,00	45,01%
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.904.907,00	Rp -	0,00%
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	281.509.750,00	Rp -	0,00%
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	164.851.500,00	Rp 9.450.780,00	5,73%
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	107.626.000,00	Rp 1.558.000,00	1,45%
VII	Mutasi dan Promosi ASN	601.569.375,00	113.643.000,00	18,89%
1	Pengelolaan Mutasi ASN	111.306.500,00	Rp 56.265.000,00	50,55%
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	274.839.875,00	Rp 36.618.000,00	13,32%
3	Pengelolaan Promosi ASN	215.423.000,00	Rp 20.760.000,00	9,64%
VIII	Pengembangan Kompetensi ASN	4.037.348.125,00	1.075.428.447,00	26,64%
1	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	764.544.375,00	Rp 215.877.750,00	28,24%
2	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.148.750,00	Rp -	0,00%

3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	276.079.500,00	Rp 37.000.000,00	13,40%
4	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.272.443.500,00	Rp 400.153.833,00	31,45%
5	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1.389.707.000,00	Rp 330.970.000,00	23,82%
6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	317.425.000,00	Rp 91.426.864,00	28,80%
IX	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.759.287.625,00	172.028.780,00	9,78%
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	441.734.250,00	Rp 24.223.520,00	5,48%
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	930.282.000,00	Rp 46.646.000,00	5,01%
3	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	148.462.500,00	Rp 63.554.760,00	42,81%
4	Pembinaan Disiplin ASN	70.461.375,00	Rp 10.099.000,00	14,33%
5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	118.633.750,00	Rp 20.410.500,00	17,20%
6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	49.713.750,00	Rp 7.095.000,00	14,27%
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.736.567.000,00	1.724.693.210,00	25,60%
X	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.877.971.000,00	776.195.710,00	41,33%

1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	42.275.000,00	Rp 895.000,00	2,12%
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.835.696.000,00	Rp 775.300.710,00	42,23%
XI	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.858.596.000,00	948.497.500,00	19,52%
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	30.137.500,00	Rp 4.160.000,00	13,80%
2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi diLingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	93.778.500,00	Rp -	0,00%

3	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	85.205.000,00	Rp -	0,00%
4	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	83.192.500,00	Rp -	0,00%
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.522.320.000,00	Rp 942.537.500,00	20,84%
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	43.962.500,00	Rp 1.800.000,00	4,09%
		43.626.937.038,00	9.630.806.477,00	22,08%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Capaian kinerja pelayanan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk tahun $n-2$, $n-1$, tahun n dan tahun $n+1$ *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel – C.30.*

Tabel C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BKPSDM Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3		6	7	8		10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90	90	90	94,05	99,03	99,03	99,03	
	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah			95	95	90	90	90	90	90	90	
2	Nilai AKIP			60	60	60	60	67,5	70,5	71,5	72,5	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7	7	7	7	7	7	7	7	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14	14	14	14	14	14	14	14	
5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	

6	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					1	1			1	1	
7	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67	67	67	67	79	79	79	79	
9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			20	20	20	20	27	27	27	27	
10	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5	5	5	5	12	12	12	12	
11	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3	3	3	3					
	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100				100	
12	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			94	94	94	94					
13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20	20	20	20					
14	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20	20	20	20					

15	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi			100	100	100	100				100	
16	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
17	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
18	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	4	4	4					
19	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10	10	10	10	10	10	10	10	
20	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
21	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	1	1					
22	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			10	10	10	10	10	10	10	10	
23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30	30	30	30	30	30	30	30	
24	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	

	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100	100	100	100				100	
25	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	1	1	1					
26	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
27	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2	2	2	2					
28	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1	1	1	1					
29	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			2	2	2	2	1	1	1	1	
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP			100	100	100	100				100	
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1	1	1	37	37	37	37	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			37	37	37	37	12	12	12	12	
32	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4	4	4	4	1	1	1	1	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100	100	100	100				100	
33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	12	12	12	28	28	28	28	

34	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	1	1	1	1	1	1	1	
35	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28	28	28	28	2	2	2	2	
36	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
37	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2	2	2	1	1	1	1	
38	Persentase Pelayanan Kepegawaian			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN			8	8	8	8	87,5	87,5	87,5	87,5	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			100	100	100	100				100	
40	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
42	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			100	100,00	100,00	39,88	1,00	1	1	1	

43	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			87,5	87,5	87,5	87,5	1	1	1	1	
44	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			1	1	1	1	4	4	4	4	
45	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1	1	1	1	3	3	3	3	
46	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
47	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
48	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			4	4	4	4	1	1	1	1	
49	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
50	Jumlah Usulan Mutasi dan Promosi ASN			1	1	1	1	67	67	67	67	
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			100	100	100	100	100	100	100	100	
51	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1	1	1	1	2	2	2	2	
52	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1	1	1	1	1000	1000	1000	1000	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			150	150	150	150	2	2	2	2	

54	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			2	2	2	2	1285	1285	1285	1285	
	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya			100	100	100	100	100	100	100	100	
55	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			700	700	700	700	2	2	2	2	
56	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			2	2	2	2	2	2	2	2	
57	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			500	500	500	500	5	5	5	5	
58	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2	2	2	2	2	2	2	2	
59	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2	2	2	2	117	117	117	117	
60	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			10	10	10	10	2	2	2	2	
61	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			2	2	2	2	200	200	200	200	
62	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			100	100	100	100	20	20	20	20	
63	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			2	2	2	2	1	1	1	1	
64	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur			2	2	2	2	79,29883	79,30	79,30	79,30	
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik			79,3	79,3	95	95	79,3	79,30	95,00	95,00	

65	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			200	200	200	200	2	2	2	2	
66	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			20	20	20	20	21	21	21	21	
67	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			1	1	1	1	385	385	385	385	
68	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			79,29883	79,30	79,30	79,30	3,00	3	3	3	
69	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			2	2	2	2	7	7	7	7	
70	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			700	700	700	700	1	1	1	1	
71	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			400	400	400	400	14	14	14	14	
72	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			3	3	3	3	1	1	1	1	
73	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			120	120	120	120	47	47,00	84,11	84,11	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
74	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			1	1	1	1	200	200	200	200	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100	100	100	100	100	

75	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			15	15	15	15	1	1	1	1	
76	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			1	1	1	1	830	830	830	830	
77	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1	1	1	1	1	1	1	1	
78	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional			45,62178	45,62	45,62	45,62	996,00	996	996	996	
	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	

79	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			200	200	200	200	2	2	2	2	
80	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik			1	1	1	1	1	1	1	1	
81	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			200	200	200	200	10	10	10	10	
82	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			1	1	1	1	2	2	2	2	
83	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			420	420	420	420	5	5	5	5	

84	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			2	2	2	2	1	1	1	1	
85	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik			1	1	1	1			1	1	
86	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			10	10	10	10			10	10	
87	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar			1	1	1					1	
88	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			2	2	2	2			2	2	
89	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			5	5	5	5			5	5	

90	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			1	1	1	1			1	1	
----	---	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang merupan salah satu instansi yang memberikan pelayanan bagi aparatur dalam sisi kebutuhan kepegawaian. Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 Yaitu “ Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju “ , BKPSDM mengusung misi ke 5 yaitu “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel”

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2025 adalah masalah eksternal karena sebagian besar outcomes akhir produk kegiatan BKPSDM Kota Samarinda ada pada pihak ketiga , diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (Pusat dan Regional) , Kementerian PAN RB , BKD Propinsi Kalimantan Timur , Lembaga Administrasi Negara , BPSDM Propinsi Kalimantan Timur

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut BKPSDM Kota Samarinda untuk terus mengembangkan sistem , meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik.

Berdasarkan **identifikasi permasalahan** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka dapat ditentukan **isu-isu penting** sebagai berikut :

Tabel
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Indeks Profesionalitas ASN masih rendah	1	Masih belum meratanya distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	1	Masih kurangnya pelaksanaan uji kompetensi untuk semua lini dan struktur jabatan
				2	Terdapat PNS yang sudah pensiun yang tidak diisi/ digantikan oleh PNS dengan anjab sejenis

				3	Penerimaan PPPK belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
				4	Kurangnya dukungan OPD untuk input penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing
				5	Masih kurangnya intensitas pelaksanaan diklat teknis, struktural dan fungsional dalam pengelolaan pembangunan
				6	Terbatasnya diklat yang diikuti setiap ASN
		2	Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kepegawaian masih kategori sedang	1	Kurangnya komitmen bersama untuk mematuhi norma standar tersebut.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan sebagai berikut:

- Percepatan Penerapan Manajemen Talenta berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mulai dari perencanaan ASN, pengembangan kompetensi ASN dan karier, hingga pada kompensasi.
- Pengembangan Kompetensi ASN yang terintegrasi (*Corporate University*) yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap perilaku melalui pendekatan pembelajaran ang kolaboratif, terbuka, dinamis dan saling terhubung satu dengan lainnya;
- Digitalisasi Layanan Kepegawaian;

- Penguatan Integritas dan Netralitas ASN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.;
- Penataan , penempatan dan promosi berdasarkan kompetensi
- Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM tidak jauh berbeda mengikuti aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan pengembangan aparatur sebagaimana terlihat dalam tabel T- C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.576.696.330,00	-69.728.484.405,00							25.291.914.626,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				93,6 Nilai	71,50 95,00 Nilai Indeks	95.292.166.326,00	29.452.159.306,00	28.855.717.173,00	-79.725.251.702,00							15.566.914.626,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				60 Nilai	100 %	350.000.000,00	315.143.000,00	164.566.110,00	-185.433.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		357.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	180.119.000,00	62.474.110,00	-137.525.890,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			128.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	68.373.000,00	52.576.000,00	-22.424.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			77.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	45.981.000,00	36.199.000,00	-13.801.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.670.000,00	13.317.000,00	13.317.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

5	NON URUSAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00						30.191.914.626,00	
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.576.696.330,00	-69.728.484.405,00						25.291.914.626,00	
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00						30.191.914.626,00	
5.03	KEPEGAWAIAN							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.576.696.330,00	-69.728.484.405,00						25.291.914.626,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	100 %	92.980.780.178,00	27.476.071.156,00	27.017.874.963,00	-65.962.905.215,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12.649.284.476,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	75 Orang/bulan	88.608.139.542,00	26.378.070.937,00	25.928.061.744,00	-62.680.077.798,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PARKIR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		11.850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26 Dokumen	4.322.640.636,00	1.051.972.219,00	1.051.972.219,00	-3.270.668.417,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		749.284.476,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	46.028.000,00	37.841.000,00	-12.159.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				1 Laporan	100 %	794.256.000,00	549.628.000,00	390.967.800,00	-403.288.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		964.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.512.000,00	-4.488.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disdiakan				4 Paket	4 Paket	309.256.000,00	154.628.000,00	154.628.000,00	-154.628.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	36.998.800,00	-3.001.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	15 Laporan	400.000.000,00	310.000.000,00	158.829.000,00	-241.171.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			679.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah				1 Laporan	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	417.500.000,00	257.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		589.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				1 Laporan	100 %	309.133.000,00	253.320.000,00	253.320.000,00	-55.813.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		309.133.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	27 Laporan	139.133.000,00	83.320.000,00	83.320.000,00	-55.813.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			139.133.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				1 Laporan	100 %	697.997.150,00	697.997.150,00	611.488.300,00	-86.508.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai BKPSDM		697.997.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	28 Unit	455.997.150,00	455.997.150,00	455.997.150,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			455.997.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	197.000.000,00	197.000.000,00	110.491.150,00	-86.508.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			197.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi				100 Persen	100 %	10.013.014.407,00	9.226.397.407,00	6.720.979.157,00	-288.014.407,00							9.725.000.000,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi				100 Persen	100 %	1.606.181.907,00	1.521.626.907,00	1.139.145.657,00	-467.036.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		2.225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.352.000,00	3.062.000,00	-21.938.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	765.364.000,00	696.092.000,00	-103.908.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	131.181.907,00	112.346.907,00	65.904.907,00	-65.277.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	292.536.000,00	125.909.750,00	-174.090.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	190.008.000,00	152.631.000,00	-47.369.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	137.020.000,00	95.546.000,00	-54.454.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya					100 Persen	100 %	850.000.000,00	779.677.000,00	601.569.375,00	-248.430.625,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	137.158.000,00	111.306.500,00	-38.693.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					700 Dokumen	700 Dokumen	300.000.000,00	292.080.000,00	274.839.875,00	-25.160.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	350.439.000,00	215.423.000,00	-184.577.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 Persen	100 %	5.556.832.500,00	5.038.976.500,00	3.240.497.125,00	-2.316.335.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM	4.025.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	22.937.000,00	17.148.750,00	-7.851.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gonorasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	5 Orang	300.000.000,00	290.547.000,00	276.079.500,00	-23.920.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	1 Dokumen	1.975.850.000,00	1.742.691.000,00	1.028.892.500,00	-946.957.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		2.000.000.000,00		
5.03.02.2.03.0006	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				100 Orang	100 Orang	2.000.000.000,00	1.788.944.000,00	991.407.000,00	-1.008.593.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		1.000.000.000,00		
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	372.583.000,00	162.425.000,00	-237.575.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		250.000.000,00		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik				100 Persen	95 %	2.000.000.000,00	1.886.117.000,00	1.739.767.000,00	-260.233.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM	1.975.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	480.725.000,00	440.381.500,00	-59.618.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				700 Orang	9 Orang	1.000.000.000,00	967.627.000,00	930.282.000,00	-69.718.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	150 Orang	200.000.000,00	160.790.000,00	148.462.500,00	-51.537.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	85.499.000,00	65.273.000,00	-34.727.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	141.476.000,00	106.513.000,00	-43.487.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Penceraian Pegawai																	
		Jumlah Dokumen Proses Izin Penceraian Pegawai yang Dilyani				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.855.000,00	-1.145.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							8.179.793.000,00	7.661.998.000,00	5.993.604.341,00	-2.186.188.659,00						4.900.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100 Persen	100 %	8.179.793.000,00	7.661.998.000,00	5.993.604.341,00	-3.279.793.000,00						4.900.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100 Persen	100 %	2.150.000.000,00	2.033.121.000,00	1.857.971.000,00	-292.029.000,00		-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pengembangan Sumber Daya Manusia		950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.425.000,00	42.275.000,00	-7.725.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	200 Orang	2.100.000.000,00	1.985.696.000,00	1.815.696.000,00	-284.304.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional				100 Persen	100 %	6.029.793.000,00	5.628.877.000,00	4.135.633.341,00	-1.894.159.659,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	30.450.000,00	30.450.000,00	30.137.500,00	-312.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	97.926.000,00	93.778.500,00	-6.221.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	95.110.000,00	7.750.000,00	-92.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.075.000,00	7.750.000,00	-92.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	5.649.343.000,00	5.262.561.000,00	3.952.254.841,00	-1.697.088.159,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA								
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Serifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Serifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	48.755.000,00	43.962.500,00	-6.037.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA								
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI						113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.873.064,00							30.191.914.626,00									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.873.064,00							30.191.914.626,00									
5.03		KEPEGAWAIAN						105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.576.696.330,00	-69.728.484.405,00							25.291.914.626,00									
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			-	100 %	10.013.014.407,00	9.226.397.407,00	6.720.979.157,00	-288.014.407,00							9.725.000.000,00									
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti penilaian kompetensi			-	78,71 %	5.556.832.500,00	5.038.976.500,00	3.240.497.125,00	-2.316.335.375,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			4.025.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA								
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																									
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	1 Dokumen	855.982.500,00	821.274.500,00	764.544.375,00	-91.438.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA								
		J U M L A H						113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.873.064,00							30.191.914.626,00									

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholders BKPSDM Kota Samarinda . BKPSDM Kota Samarinda merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kota Samarinda belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Samarinda.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ,yaitu :

- a. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi untuk operasional Dana Kelurahan, karena SDM Aparatur Sipil Negara di wilayah kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda terdepan pelayanan langsung kepada masyarakat sangat penting
- b. Talent pool untuk Kader Potensial sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pengembangan karir dan penataan ASN
- c. Roadmap karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran pengembangan karir ASN
- d. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolak ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan

perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah.

Transformasi urusan pemerintahan kedalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, program disusun dengan memerhatikan sub bidang urusan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya, ditetapkan 3 (tiga) program yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM. Rencana program prioritas berdasarkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA PROGRAM
1	5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Berikut 12 kegiatan yang ada akan dilaksanakan BKPSDM untuk 1 (satu) tahun kedepan.

KEGIATAN

NO	KODE	NAMA KEGIATAN
1	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
9	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN

10	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
11	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
12	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Maka berdasarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana sebelumnya disebutkan, dijabarkan ke dalam 50 sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

SUB KEGIATAN

NO	KODE	NAMA SUB KEGIATAN
1	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
3	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7	5.03.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
13	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
15	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud
16	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
23	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
24	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
25	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
26	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

27	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian
28	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN
29	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
30	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN
31	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center
32	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
33	5.03.02.2.02.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
34	5.03.02.2.02.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
35	5.03.02.2.02.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
36	5.03.02.2.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
37	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
38	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
39	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
40	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN
41	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
42	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
43	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
45	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
46	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi diLingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
47	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar
48	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
49	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
50	5.04.02.2.02.0008	

3.2 Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja perubahan yang ada adalah :

Kode Urusan/						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		TW 1		TW 2		Realisasi		Realisasi		Tingkat	
Bidang Urusan/							Kinerja	dan Anggaran						Capaian		Kinerja dan		Capaian	
Program/							Program	RKPD Kota Tahun						Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
Kegiatan/							(Outcome)/	berjalan yg						dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2025		Realisasi	
Sub Kegiatan)							Kegiatan	dievaluasi (2025)						RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Anggaran	
							(Output)							Dievaluasi (2025)				RKPD Tahun	
																		2025 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							1			1	2	2							
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda													
5						KEPEGAWAIAN			38,678,5 56,713		3,373,54 6,308		4,583,33 1,863		7,956,87 8,171		33,362,4 90,923	24. 25	20. 57
5						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		9,226,39 7,407		505,245, 987		998,187, 023		1,503,43 3,010		12,258,5 47,010	14. 56	16. 29	
5							Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 Persen		14, 97		66, 52		5				5	
5							Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1,521,62 6,907		158,806, 000		161,467, 180		320,273, 180		2,306,95 0,101	20. 83	21. 05
5							Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen		3,7		6,1		5				5	
5							Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk		24,352,0 00		0		0		0		0	0	0

					Pelaksanaan Pengadaan ASN													
5	3	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1				0				0	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			765,364,000		151,509,000		152,155,400		303,664,400		1,081,782,665	0	39.68
5	3	2	2.01	3		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		0				0				0	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			112,346,907		0		0		0		126,137,688	25	0
5	3	2	2.01	6		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen		1		1		1				25	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			292,536,000		0		5,600,000		5,600,000		697,931,557	100	1.91
5	3	2	2.01	8		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1				1				100	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			190,008,000		7,297,000		2,153,780		9,450,780		153,127,626	0	4.97
5	3	2	2.01	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0				0				0	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			137,020,000		0		1,558,000		1,558,000		111,147,819	0	1.14

5	3	2	2.01	1	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		0				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20.83	21.05
Predikat Kinerja																		SR	SR
5	3	2	2.02			Mutasi dan Promosi ASN			779,677,000		0		122,243,000		122,243,000		1,763,164,387	5.67	15.68
5	3	2	2.02				Persentase Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen		17,6		40		25				25	
5	3	2	2.02	1		Pengelolaan Mutasi ASN			137,158,000		0		56,265,000		56,265,000		262,793,398	0	41.02
5	3	2	2.02	1			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		0		1		0				0	
5	3	2	2.02	2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			292,080,000		0		43,218,000		43,218,000		408,442,113	17	14.8
5	3	2	2.02	2			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen		119		400		119				17	
5	3	2	2.02	3		Pengelolaan Promosi ASN			350,439,000		0		22,760,000		22,760,000		1,091,928,876	0	6.49
5	3	2	2.02	3			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		0				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		5.67	15.68
Predikat Kinerja																		SR	SR
5	3	2	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN			5,038,976,500		213,961,207		634,526,843		848,488,050		6,439,095,603	22.83	16.84
5	3	2	2.03				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen(500 ORANG)		13,6		195%		0				0	

5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			22,937,000	0		0		0		100,034,000	0	0
5	3	2	2.03	3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		0			0					0	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			290,547,000	37,000,000		0		37,000,000		1,350,174,700	100	12.73
5	3	2	2.03	4	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang (perubahan tambah 1 rang)		5			5					100	
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			1,742,691,000	60,770,000		392,423,833		453,193,833		1,832,963,376	0	26.01
5	3	2	2.03	5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen		0			0					0	
5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			1,788,944,000	83,730,000		19,400,000		103,130,000		1,195,390,918	2	5.76
5	3	2	2.03	8	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang		2			2					2	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			372,583,000	24,094,467		60,342,000		84,436,467		201,924,649	35	22.66
5	3	2	2.03	14	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang(PERUBAHAN DITAMBAH TARGET)		7		16		7				35	

5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center - UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai			821,274,500		8,366,740		162,361,010		170,727,750		1,501,878,750	0	20.79
5	3	2	2.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	22.83	16.84
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,886,117,000		132,478,780		79,950,000		212,428,780		1,749,336,919	8.89	11.26
5	3	2	2.04			Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Persen (4 penilaian /4 Periode *100)		25		25						25	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			480,725,000		24,223,520		40,000,000		64,223,520		298,350,511	0	13.36
5	3	2	2.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		0				0				0	
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			967,627,000		18,416,000		28,230,000		46,646,000		986,035,910	0	4.82
5	3	2	2.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang(RUBAH DI PERUBAHAN JD 27)		0		0		0				0	
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			160,790,000		63,954,760		0		63,954,760		122,308,760	0	39.78
5	3	2	2.04	5		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang (RUBAH TARGET JD 400 DI PERUBAHAN)		145				0				0	
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN			85,499,000		10,099,000		0		10,099,000		92,783,800	13.33	11.81

5	3	2	2.04	7		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang		4		8		4				13.33	
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			141,476,000		8,690,500		11,720,000		20,410,500		62,273,863	0	14.43
5	3	2	2.04	8		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		0				0				0	
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			50,000,000		7,095,000		0		7,095,000		86,335,614	40	14.19
5	3	2	2.04	9		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		6		5		6				40	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8.89	11.26
Predikat Kinerja																	SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																	14.56	16.29
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29,452,159,306		2,868,300,321		3,585,144,840		6,453,445,161		21,103,943,913	33.94	21.91
5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 Nilai		97.6			97.6					104.27	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			315,143,000		0		23,454,200		23,454,200		242,338,809	26.1	7.44
5	3	1	2.01			Nilai AKIP	60 Nilai		70.5			0					0	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			180,119,000		0		13,962,200		13,962,200		118,357,785	29.41	7.75

5	3	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		5				5				29.41	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			68,373,000		0		3,540,000		3,540,000		74,327,039	50	5.18
5	3	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		7				7				50	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,981,000		0		5,952,000		5,952,000		49,653,985	25	12.94
5	3	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		1		1				25	
5	3	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			20,670,000		0		0		0		0	0	0
5	3	1	2.01	8		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	26.1	7.44
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27,476,071,156		2,801,859,021		3,209,381,079		6,011,240,100		18,623,267,430	70.57	21.88
5	3	1	2.02			Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan		1		1		1				14.29	

5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26,378,070,937		2,502,064,021		3,016,765,079		5,518,829,100		17,110,030,491	95.71	20.92
5	3	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		67				67				95.71	
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,051,972,219		293,175,000		182,725,000		475,900,000		1,450,069,295	96	45.24
5	3	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen		24				24				96	
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			46,028,000		6,620,000		9,891,000		16,511,000		63,167,644	20	35.87
5	3	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1		1		1				20	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	70.57	21.88
Predikat Kinerja																	S	SR
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			549,628,000		30,945,000		46,599,960		77,544,960		1,160,741,273	33.33	14.11
5	3	1	2.06			Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		0				0				0	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,000,000		0		0		0		11,809,700	25	0
5	3	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 Paket		1		1		1				25	

						Kantor yang Disediakan													
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			154,628,000	0	0	0	0	297,250,000	25	0				
5	3	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1	1	1			25					
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25,000,000	4,800,000	0	4,800,000	13,635,000	50	19.2					
5	3	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		5		5		50						
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40,000,000	26,145,000	10,491,500	36,636,500	78,321,900	50	91.59					
5	3	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		3		3		50						
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10,000,000	0	0	0	11,910,000	50	0					
5	3	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		5		5		50						
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			310,000,000	0	36,108,460	36,108,460	747,814,673	0	11.65					
5	3	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		12	17	0		0						
Rata-rata capaian kinerja (%)														33.33	14.11				
Predikat Kinerja														SR	SR				
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160,000,000	0	72,532,500	72,532,500	72,532,500	0	45.33					

5	3	1	2.07			Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		0				0				0	
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			100,000,000		0		12,532,500		12,532,500		12,532,500	0	12.53
5	3	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0				0				0	
5	3	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud			60,000,000		0		60,000,000		60,000,000		60,000,000	0	100
5	3	1	2.07	8		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		2				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	45.33
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			253,320,000		34,486,400		56,184,600		90,671,000		303,537,000	23.61	35.79
5	3	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan		0				0				0	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			83,320,000		2,486,400		3,734,600		6,221,000		82,112,000	22.22	7.47
5	3	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27 Laporan		6		6		6				22.22	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			170,000,000		32,000,000		52,450,000		84,450,000		221,425,000	25	49.68
5	3	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3		3				25	

Rata-rata capaian kinerja (%)																	23. 61	35. 79
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	3	1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			697,997, 150		1,009,90 0		176,992, 501		178,002, 401		701,526, 901	50	25. 5
5	3	1	2. 09			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		0				0				0	
5	3	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			455,997, 150		1,009,90 0		144,210, 001		145,219, 901		362,972, 401	100	31. 85
5	3	1	2. 09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		28				28				100	
5	3	1	2. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15,000,0 00		0		0		0		0	0	0
5	3	1	2. 09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1				0				0	
5	3	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			197,000, 000		0		20,590,0 00		20,590,0 00		173,072, 000	0	10. 45
5	3	1	2. 09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit		0				0				0	

5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30,000,000	0	12,192,500	12,192,500	41,242,500	100	40.64
5	3	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)												50	25.5
Predikat Kinerja												SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)												33.94	21.91
Predikat Kinerja												SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							0	0	4,583,331,863	7,956,878,171			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												24.25	20.57
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												SR	SR
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7,661,998,000	471,624,651	1,181,407,500	1,653,032,151	6,156,943,417	14.34	21.57
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		7,661,998,000	471,624,651	1,181,407,500	1,653,032,151	6,156,943,417	14.34	21.57
5	4	2			Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Persen(1200 ORANG)	9,25	3,9	25			25	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		2,033,121,000	99,589,651	625,145,000	724,734,651	1,808,747,630	12	35.65
5	4	2	2.01		Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen (TARGET 200 ORANG)	24					25	

5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		47,425,000	0	895	895	350,457,554	0	1.89
5	4	2	2.01	1	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0	0				0	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1,985,696,000	99,589,651	624,250,000	723,839,651	1,319,799,376	24	36.45

5	4	2	2.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang(RUBAH TARGET DI PERUBAHAN)		48				48				24	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	12	35.65
Predikat Kinerja																	SR	SR
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5,628,877,000		372,035,000		556,262,500		928,297,500		4,348,195,787	16.67	16.49
5	4	2	2.02			Persentase Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen (TARGET 1000 ORANG)		6,3		4,7		25				25	
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			30,450,000		4,160,000		0		4,160,000		114,773,681	100	13.66

5	4	2	2.02	1	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1				1				100	
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		97,926,000	0		0		0			64,866,000	0	0
5	4	2	2.02	3	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang		0				0				0	
5	4	2	2.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		95,110,000	0		7,750,000		7,750,000			113,415,000	0	8.15
5	4	2	2.02	4	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		0				0				0	

5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			94,075,000		0		7,750,000		7,750,000		78,224,748	0	8.24
5	4	2	2.02	5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen					0					0	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			5,262,561,000		366,075,000		536,712,500		902,787,500		3,894,552,428	0	17.15
5	4	2	2.02	7		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		0			0					0	
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,			48,755,000		1,800,000		4,050,000		5,850,000		82,363,930	0	12

					Kepemimpinan, dan Prajabatan														
5	4	2	2. 02	8	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		0				0					0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		16. 67	16. 49
Predikat Kinerja																		SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																		14. 34	21. 57
Predikat Kinerja																		SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0		0	1,181,40 7,500		1,653,03 2,151					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		14. 34	21. 57
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		SR	SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																			
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																			
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai acuan dalam pembangunan sektor Kepegawaian di Kota Samarinda yang didasari pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Terwujudnya “*good governance*” sangat dibutuhkan sehingga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk rincian kegiatan setiap tahunnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.